

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjenis kelamin perempuan dapat digolongkan ke dalam bentuk partisipasi politik aktif yaitu dengan menduduki jabatan politik sebagai anggota dewan yang berperan salah satunya dengan memerjuangkan hak perempuan agar menghasilkan kebijakan yang lebih memerhatikan dan berpihak pada kepentingan perempuan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas politik anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjenis kelamin perempuan bermula dari adanya keinginan untuk ikut melakukan gerakan-gerakan yang berpihak kepada masyarakat sehingga mendorong anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk ikut bergabung dengan organisasi masyarakat maupun partai politik yang dinilai mampu memfasilitasi dan menyalurkan keinginannya tersebut.
3. Kendala yang menghambat partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu, pertama, adanya anggapan bahwa politik itu ‘kotor’; kedua, faktor keluarga dan anak; ketiga, belum percaya diri akan kemampuan yang dimiliki; keempat, kurangnya pendidikan politik; kelima, masih adanya sikap ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap perempuan

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang menduduki tampuk kekuasaan; dan keenam, belum adanya dukungan dari sesama kaum perempuan.

4. Peran strategis anggota legislatif perempuan dalam memengaruhi setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan di DPRD Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan melalui eksistensinya dalam menampung aspirasi dari kaum perempuan dan memperjuangkannya di forum musyawarah legislatif. Dalam menentukan setiap kebijakan yang diputuskan di legislatif, para anggota dewan perempuan berhak bersuara untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diputuskan supaya lebih memperhatikan kepentingan perempuan dalam kebijakan tersebut.
5. Motivasi politik yang menjadi dasar bagi anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat adalah adanya keinginan anggota dewan perempuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan yang menyebabkan anggota dewan perempuan tergerak untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya berpihak kepada masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan.
6. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) sebagai wadah bagi anggota legislatif perempuan untuk bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai permasalahan perempuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di masyarakat yang meliputi KDRT, penanggulangan HIV/ AIDS, narkoba, perlindungan anak, perdagangan manusia, PAUD, pembinaan

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

WTS, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, agama, sosial, lansia, dan anak terlantar, untuk selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat dan dirumuskan dalam kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan terhadap partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat, dicanangkan beberapa program yang mencakup program pembinaan kesejahteraan perempuan, pemberian wawasan kepada pengurus partai, dan pelaksanaan program yang mendukung bagi terlaksananya Perda yang telah ditetapkan, misalnya melalui kegiatan seminar-seminar maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

B. Saran

1. Bagi DPRD Provinsi Jawa Barat

Hendaknya Pemerintah DPRD Provinsi Jawa Barat terus memberikan dukungan bagi partisipasi aktif anggota legislatif perempuan dalam aktivitas perpolitikan di legislatif.

2. Bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjenis kelamin perempuan

Anggota dewan perempuan dituntut untuk lebih memerankan diri di masyarakat, terutama kepada kaum perempuan, untuk menumbuhkan motivasi politik perempuan dan mendorongnya untuk ikut terlibat secara aktif dalam aktivitas perpolitikan.

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3. Bagi DPP partai politik

Dalam rekrutmen pengurus partai hendaknya memperhatikan kualitas calon pengurus tersebut, terlebih kualitas dari calon perempuan, agar mampu menempatkan wakil-wakil perempuan yang berkualitas dan mampu bersaing secara sportif.

4. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat bersikap terbuka terhadap perempuan yang menduduki tampuk kepemimpinan di masyarakat dengan memberikan dukungan terhadap aktivitas perempuan di masyarakat.

5. Bagi Mata Pelajaran PKn

Pentingnya peran aktif perempuan dalam politik sebaiknya disisipkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

6. Bagi Peneliti selanjutnya

Pada masa yang akan datang, diharapkan akan lebih banyak karya tulis sejenis yang memfokuskan pada peranan anggota dewan perempuan di legislatif.